

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

kementerian keLaUtan Dan Perikanan

BPPMHKP



STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

TANJUNG BALAI ASAHAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis 2024-2027

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun, yaitu 2024-2027 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP mempunyai tanggungjawab dalam mendukung mewujudkan visi dan misi yang diemban oleh BPPMHKP Selaras dengan visi dan misi, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, maka visi dan misi yang diemban Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan 2024-2027 adalah sebagai berikut:

Visi

**“Hasil perikanan yang sehat bermutu,
aman konsumsi dan terpercaya”**

dengan penjelasan:

Hasil perikanan, mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud ikan, yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi, mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis

sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu) dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman Konsumsi);

Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan (HC dan HACCP) merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional.

Misi

“Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya”

Tujuan Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi maka tujuan dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan Tahun 2024-2027 adalah:

“Lalulintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan”

Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan mendukung pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yaitu “Meningkatnya lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan”.

Arah Kebijakan Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan

Arah kebijakan Stasiun KIPM Kelas Tanjung Balai Asahan diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan arah kebijakan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut. Maka Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan dalam mendukung kebijakan BKIPM yang telah ditetapkan pembangunan periode 2024-2027 sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Salah satu potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah sumberdaya alam yang terbarukan (*renewable resources*) kelautan dan perikanan. Potensi pengembangan sumberdaya tersebut diantaranya untuk:

- a. perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun.
- b. budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu dan gobi), budidaya moluska (kekerangan, mutiara dan teripang), dan budidaya rumput laut,
- c. budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha,
- d. budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa), kolam air tawar dan mina padi di sawah.

Pengelolaan sumberdaya terbarukan tersebut harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan bahkan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan.

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.

Sektor kelautan dan perikanan telah memberikan kontribusi secara nyata terhadap peningkatan ekspor Indonesia. Tahun 2024 nilai ekspor produk perikanan Indonesia sebesar 3,86 miliar dolar AS (*Sumber;Pusdatin*), Tahun 2024 nilai ekspor sebesar 4,51 miliar dolar AS (*Sumber;Detik Finance*). Tantangan ekspor hasil perikanan dipasar global semakin meningkatnya seiring dengan persyaratan yang ditetapkan oleh negara importir seperti Amerika, Uni Eropa, Jepang, Korea, China, Rusia, dan Kanada.

Tantangan yang dihadapi dalam ekspor hasil perikanan adalah persyaratan pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*quality and safety assurance*).

3. Pengendalian kualitas hasil perikanan melalui sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Peningkatan produksi perikanan harus diimbangi dengan peningkatan kualitasnya. Salah satu kelemahan hasil perikanan adalah cepatnya turunnya kualitas sehingga perlu dilakukan penanganan dengan baik. Pengendalian kualitas hasil perikanan dimulai dari cara budidaya ikan yang baik, cara penangkapan ikan yang baik, dan penerapan konsep *traceability* serta dilakukan pengolahan pada unit pengolahan ikan yang tersertifikasi. Strategi yang ditempu dalam rangka menjalankan kebijakan pembangunan perikanan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan 2024-2027, yaitu :

- a. Pengendalian hama penyakit ikan karantina melalui penerapan in line inspection

Dalam rangka menjalankan strategi tersebut, beberapa langkah yang dilaksanakan antara lain:

- ❖ Peningkatan kapasitas tata laksana laboratorium dan instalasi dalam rangka mendukung validasi metode uji yang berbasis diagnosa cepat, tepat dan akurat sesuai standar nasional dan internasional serta untuk mendukung lalulintas komoditas perikanan;

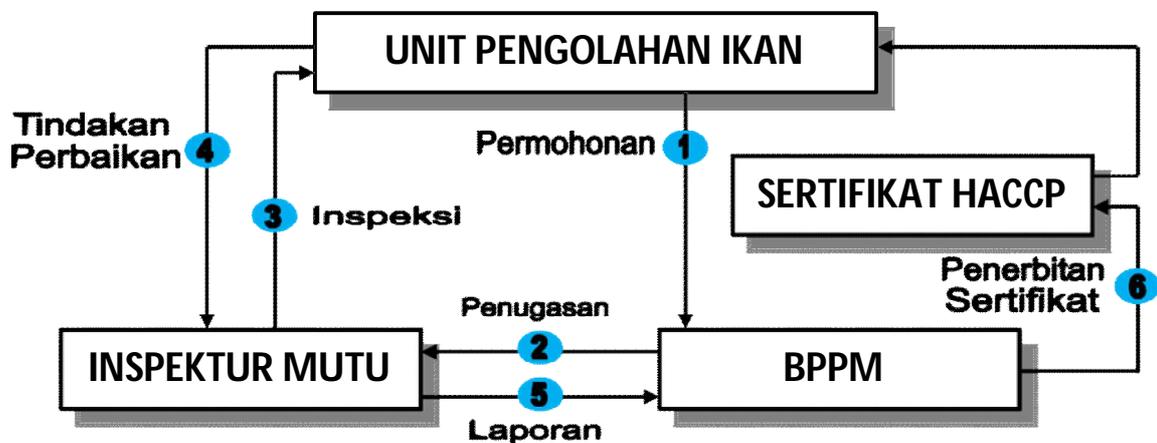
- b. Pengembangan sistem sertifikasi HACCP.

Dalam melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Indonesia menerapkan menggunakan sistem *Hazard Analisis Critical Control Point* (HACCP). Penerapan sistem HACCP diwujudkan dalam bentuk sertifikat HACCP yang merupakan dokumen persyaratan ekspor dan telah dituangkan didalam MoU/MRA dengan beberapa negara mitra, yaitu Italia, Spanyol, Prancis, Inggris, Belgia, Jerman, Luxembourg, Belanda, Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Austria, Finlandia, Swedia, Cyprus, Estonia, Republik

Czech, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Slovakia, Bulgaria, Romania, Slovenia, Norwegia, Rusia, Kanada, Korea, Vietnam, dan China.

Pengembangan sistem sertifikasi HACCP ke depan difokuskan pada penambahan sumberdaya manusia, peningkatan peran kelembagaan UPT KIPM dan pembagian operasioanl dalam menjalankan penerapan sertifikasi HACCP yang dapat digunakan sebagai dasar bagi Unit Pengolahan Ikan untuk mendapatkan dan memiliki sertifikat penerapan HACCP. Tata cara penertiban HACCP sesuai Peraturan Kepala BPPMHKP

Gambar 2. Skema proses sertifikasi penerpan HACCP



c. Pengembangan Penerbitan HC sistem IPI (*in process inspection*)

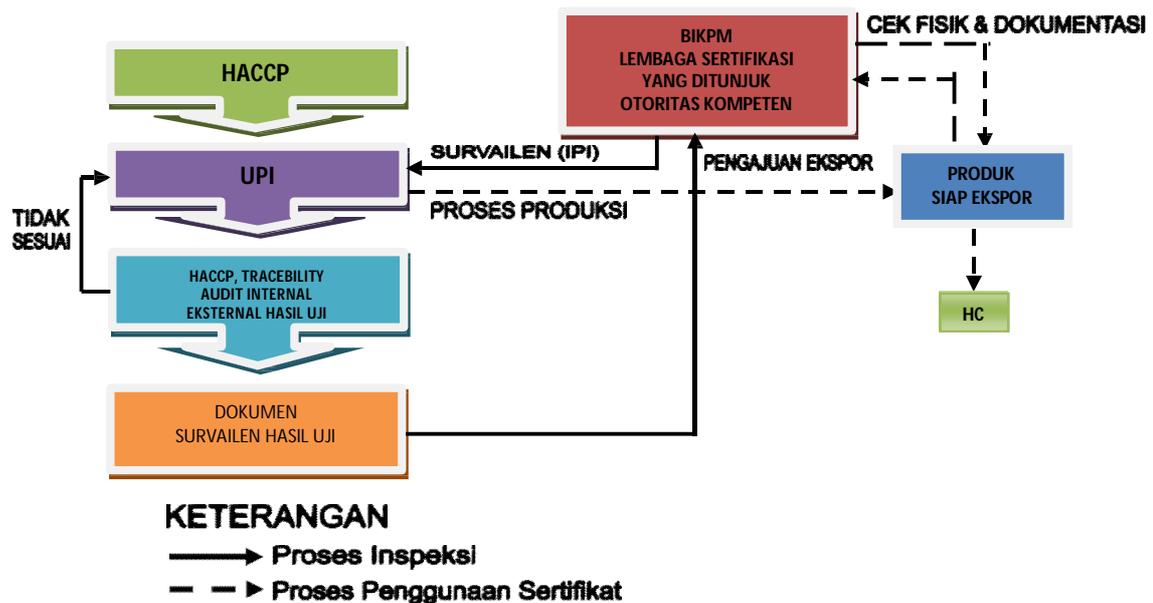
Di dalam pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, setiap produk perikanan yang telah dikendalikan diberikan jaminan berupa Sertifikat Kesehatan. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk di konsumsi manusia.

Pengembangan penertiban HC dilakukan dengan berdasarkan pada *In Proses Inspection*, yang disingkat IPI. Dengan IPI, proses penebitan HC lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan end process inspection karena pengendalian ikan dipantau/dimonitor selama proses penanganan dan pengolahan sampai keproduk akhir. Hasil pengendalian dicatat dan dibukukan, apabila terjadi ketidaksesuaian segera dapat dilakukan perbaikan, sehingga pada saat ekspor, dari

catatan hasil pengendalian (pemantauan monitoring dapat merekomendasikan penerbitan HC)

Pengembangan IPI ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) di seluruh Indonesia sebagai penyempurnaan proses penerbitan HC sebelumnya. Skema proses penerbitan HC sebagai berikut:

Gambar 3. Skema Proses Penerbitan HC



- d. Pengembangan sistem manajemen mutu dan efektif dan konsisten dari hulu sampai hilir.

Berkaitan dengan luasnya cakupan pengendalian sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, BKIPM membentuk otoritas kompeten daerah dengan mengembangkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2015 untuk memberikan keyakinan kepada pelaku industri perikanan dan negara pembeli atas kualitas layanan dan komitmen untuk kepuasan pengguna jasa. Sertifikasi dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan menurunkan ketidakpastian dikarenakan adanya standar yang harus dipenuhi. Sehingga dengan komitmen dan konsistensi penerapan ISO 9001:2015, Otoritas Kompeten mampu melaksanakan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan baik.

Selain itu, kemampuan tertelusur (*traceability*) merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Pengembangan sistem telusur ditujukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah. Kegiatan ini terutama ditujukan agar pelaku usaha pada setiap rantai bisnis hasil perikanan mampu dan mau melakukan dokumentasi secara sistematis dan konsisten. Setiap produk perikanan yang akan diekspor harus dapat ditelusuri dari hulu sampai hilir pada setiap rantai yang dilewati oleh produk tersebut.

- e. Penerapan sistem *online* pelayanan sertifikasi karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Kebutuhan akan penyediaan sistem pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan yang cepat dan prima saat ini harus dapat dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah yang menyediakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat dan prima, khususnya dalam pelayanan sertifikasi karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan bentuk dari perwujudan reformasi birokrasi serta pertanggungjawaban wewenang dari Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan.

Keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan sertifikat tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah dukungan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi yang memungkinkan keterlibatan secara langsung pengguna jasa dalam suatu sistem pelayanan sertifikat karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang berbasis online.

Tujuan utama penerapan sistem pelayanan secara online adalah untuk mempermudah pengguna jasa dalam mengajukan permohonan pelayanan sertifikat karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan sistem ini, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan, memantau perkembangan permohonan serta mendapat hasil akhir dari permohonan tersebut tanpa harus datang secara langsung ke kantor Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan atau tempat-tempat pelayanan perijinan lainnya yang ditetapkan.

Rencana Kinerja 2025

Rencana kinerja Tahun Anggaran 2025, yang disusun dengan pendekatan *balance scorecard*, merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan 2024-2027 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tingkat Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan, diimplementasikan dalam penetapan target kinerja Tahun 2025 dan Peta Strategi (*strategy map*) Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan Tahun 2025. Selanjutnya, secara berjenjang target kinerja Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan tersebut diturunkan (*cascading process*) ke tingkat Eselon IV sampai dengan tingkat individu.

Target kinerja Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan Tahun 2025 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, secara peta strategis Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan tahun 2025 telah terinci ke dalam masing-masing perspektif sebagai tabel di bawah ini.

Tabel . Target kinerja Tahun 2025 dengan Balance Scorecard

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	99
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan (%)	100
		5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan (Indeks)	87

		6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	85
		7.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT . Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.231.318.000
2.	Manajemen Mutu	80.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	156.000.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan Tahun 2025		4.467.318.000

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
STASIUN KIPM TANJUNG BALAI ASAHAN TAHUN 2025**

PROGRAM	SASARAN			KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		KET
	STRATEGIS	KINERJA	TARGET		OUTPUT/SUB	URAIAN	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	70 (%)	Peningkatan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya BPPMHKP	Layanan Program, Monitoring dan Evaluasi	Masukan : Dana dan SDM Keluaran : Belanja Bahan,Perjalanan Dinas Hasil : Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel	
	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	70 (%)	Peningkatan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya BPPMHKP	Layanan SDM Aparatur dan Organisasi	Masukan : Dana dan SDM Keluaran : Belanja Bahan,Perjalanan Dinas Hasil : Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	
	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuh isyarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	99	Peningkatan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya BPPMHKP	Layanan Keuangan dan Umum	Masukan : Dana dan SDM Keluaran : Belanja Bahan,Perjalanan Dinas Hasil : Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	
	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	100%	Peningkatan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya BPPMHKP	Layanan Hukum, Kerja Sama dan Humas	Masukan : Dana dan SDM Keluaran : Belanja Bahan,Perjalanan Dinas Hasil : Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel	
	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan (Indeks)	87	Peningkatan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya BPPMHKP	Layanan Perkantoran	Masukan : Dana dan SDM Keluaran : Belanja Pegawai, Honor Operasional Satuan Kerja, Jamuan Tamu, Penambah Daya Tahan Tubuh, Pakaian Dinas, Hasil : Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	

	SASARAN			KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		KET
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		OUTPUT/SUB OUTPUT	URAIAN	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	85	Peningkatan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya BPPMHKP	Laporan Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, dan keamanan hayati ikan	Masukan : Dana dan SDM Keluaran : Belanja Bahan Hasil : terselesainya kasus pelanggaran perkarantinaan ikan	-
	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT .Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan (Nilai)	88	Peningkatan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya BPPMHKP	Sertifikasi kesehatan ikan ekspor	Masukan : Dana dan SDM Keluaran : Belanja Bahan, Perjalanan Hasil : Terselenggaranya sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina yang sesuai standar	